

BAB I

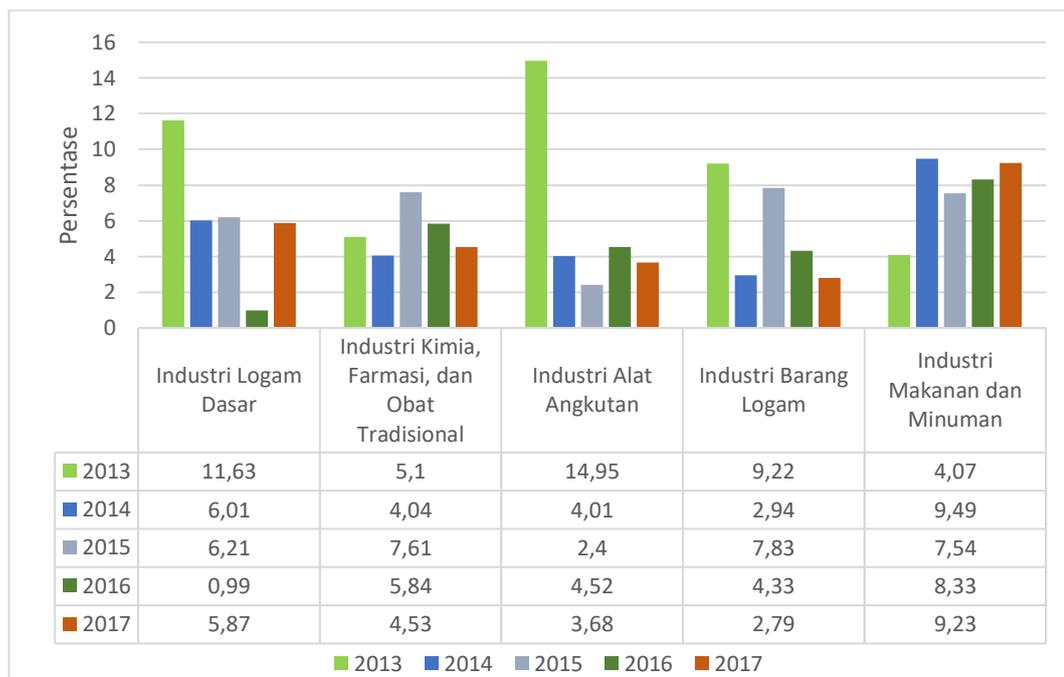
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sektor industri manufaktur merupakan sektor yang kegiatannya adalah mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Sektor sekunder yang merupakan bagian dari sektor industri manufaktur adalah: sektor industri dasar dan kimia dengan subsektor semen, keramik, porselen dan kaca, logam dan sejenisnya, kimia, plastik dan kemasan, pakan ternak, kayu dan pengolahannya, serta pulp dan kertas; sektor aneka industri dengan subsektor mesin dan alat berat, otomotif dan komponen, tekstil dan garmen, alas kaki, kabel, elektronika, dan lainnya; industri barang konsumsi dengan subsektor: makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, dan peralatan rumah tangga (www.sahamok.com). Subsektor makanan dan minuman merupakan sektor yang sangat menjanjikan seiring dengan jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan menjamurnya industri makanan dan minuman. Akibatnya persaingan antara subsektor makanan dan minuman sangat ketat. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan harus mempunyai strategi bisnis yang tepat dan melakukan berbagai inovasi agar tetap bertahan. Perusahaan membutuhkan sumber dana untuk terus melanjutkan kegiatan operasionalnya, salah satunya yaitu dengan menjadi perusahaan *go public* atau menjual saham perusahaan kepada masyarakat.

Objek penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Alasan penulis memilih studi di subsektor makanan dan minuman adalah karena subsektor tersebut merupakan salah satu bagian dari industri barang dan konsumsi yang memiliki peluang besar untuk terus tumbuh. Keberadaan subsektor makanan dan minuman sebagai penyedia barang konsumsi tentu akan terus dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu peran penting subsektor makanan sebagai sektor yang strategis ini dapat dilihat juga dari kontribusinya yang signifikan dan konsisten terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) industri non-migas. Pada triwulan III tahun 2017 PDB industri

non-migas yang disumbangkan oleh industri makanan dan minuman mencapai 34,95 persen yang menjadikan industri tersebut sebagai kontributor PDB industri terbesar dibandingkan dengan subsektor yang lain (kemenperin.go.id). Berikut ini grafik yang menunjukkan besarnya PDB (Pendapatan Domestik Bruto) kumulatif tahun 2013-2017 dari beberapa sektor industri manufaktur yang ada di Indonesia, yaitu:

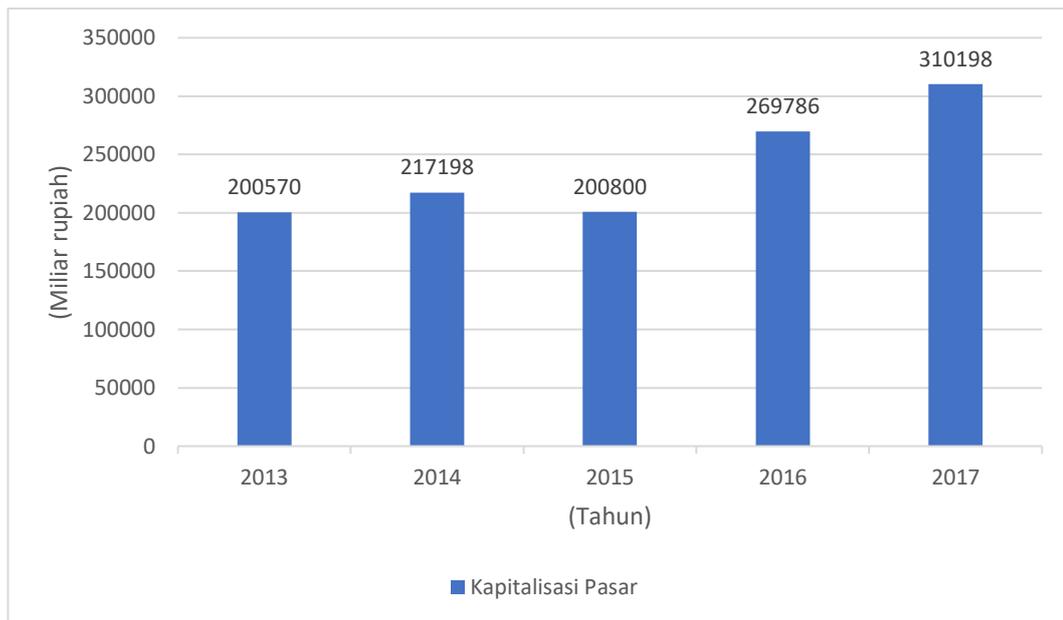


Gambar 1.1 Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Kumulatif berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (persen)

Sumber: *www.bps.go.id*, data diolah penulis (2018)

Dari grafik tersebut dapat dilihat perbandingan PDB berdasarkan lapangan usaha, antara industri logam dasar; industri kimia, farmasi dan obat tradisional; industri alat angkutan; industri barang logam; dan industri makanan dan minuman di Indonesia pada tahun 2013-2017 yang menunjukkan bahwa perusahaan pada industri tersebut mengalami fluktuasi kontribusi terhadap PDB dari tahun ke tahunnya. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2013 kontribusi terbesar berasal dari industri alat angkutan sebesar 14,95 persen; tahun 2014 berasal dari industri makanan dan minuman sebesar 9,49 persen; tahun 2015 berasal dari industri barang logam 7,83 persen; tahun 2016 berasal dari industri makanan dan

minuman; dan tahun 2017 berasal dari industri makanan dan minuman sebesar 9,23 persen. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2015, jika dibandingkan dengan industri lainnya, industri makanan dan minuman berhasil memberikan peningkatan kontribusinya terhadap PDB selama tahun 2015-2017 setidaknya sebesar 1 persen, yaitu dari 7,54 persen pada tahun 2015; 8,33 persen pada tahun 2016; dan 9,23 persen pada tahun 2017.



Gambar 1.2 Kapitalisasi Pasar Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman periode 2013-2017

Sumber: www.idx.co.id, data diolah penulis (2018)

Pada gambar 1.2 dapat dilihat grafik yang menggambarkan kapitalisasi pasar pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2013-2017. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa kapitalisasi pasar pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan. Meskipun sempat mengalami penurunan kapitalisasi pasar pada tahun 2015, namun *trendline* kapitalisasi pasar dari tahun 2015 hingga 2017 terus meningkat sehingga patut untuk diperhatikan apakah hal tersebut dapat berpengaruh terhadap upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Untuk dapat mewujudkan suatu kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia maupun standar hidup yang layak, maka pemerintah melakukan kebijakan dengan strategi khusus yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Dalam hal ini pemerintah melakukan kebijakan dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat di Indonesia yang memiliki peran yang cukup besar bagi negara dalam hal pembangunan (www.pajak.go.id).

Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dari tahun ke tahun pajak mengalami peningkatan berupa peningkatan realisasi penerimaan pajak dan komposisi pajak terhadap pendapatan negara dalam APBN. Pada tabel 1.2 disajikan tentang data realisasi penerimaan pajak dalam APBN tahun 2013-2017.

Tabel 1.1 Pendapatan Negara dan Penerimaan Pajak APBN Tahun 2013-2017 (dalam triliun rupiah)

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Negara	1.438,9	1.550,5	1.504,5	1.555,1	1.665,8
Penerimaan Pajak	1.077,3	1.146,9	1.240,4	1.285,0	1.339,8
Persentase	74,87%	73,97%	82,45%	82,63%	80,43%

Sumber: www.kemenkeu.go.id, data diolah penulis (2018)

Berdasarkan tabel 1.1, dari tahun 2013 sampai dengan 2017 penerimaan pajak dalam APBN setiap tahunnya terus meningkat. Selain itu komposisi pendapatan negara paling besar diperoleh dari penerimaan pajak, yaitu mencapai 70 persen hingga 80 persen. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya penerimaan pajak dalam kontribusinya pada pendapatan negara. Meskipun pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak selalu meningkat setiap tahunnya, angka realisasi belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN. Pada tabel 1.3 disajikan realisasi penerimaan pajak berdasarkan APBN dari tahun 2013-2017.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak APBN Tahun 2013-2017
(dalam triliun rupiah)

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
APBNP	1.148,4	1.246,1	1.489,3	1.539,2	1.472,7
Realisasi	1.077,3	1.146,9	1.240,4	1.285,0	1.339,8
Persentase	93,81%	92,04%	83,29%	83,48%	90,98%

Sumber: www.kemenkeu.go.id, data diolah penulis (2018)

Berdasarkan tabel 1.2, realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu tidak mencapai target. Pemerintah bertujuan agar penerimaan pajak yang diterima adalah 100 persen dari anggaran atau target yang telah ditentukan. Namun, persentase realisasi penerimaan pajak berfluktuasi, dimana terus terjadi penurunan selama tahun 2013-2015, lalu meningkat pada 2016-2017. Misalnya yang terjadi pada tahun 2017, dimana persentase realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 90,98 persen, target penerimaan pajak adalah sebesar Rp1.472,7 triliun, sedangkan realisasinya sebesar Rp1.339,8. Adanya ketidakcapaian target ini dapat menjadi penyebab terjadinya defisit pada APBN, akibatnya *debt ratio* atau pembiayaan negara melalui utang akan meningkat. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah pemberlakuan *self assessment system* dan *tax amnesty*.

Menurut Mardiasmo (2018: 9), *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan

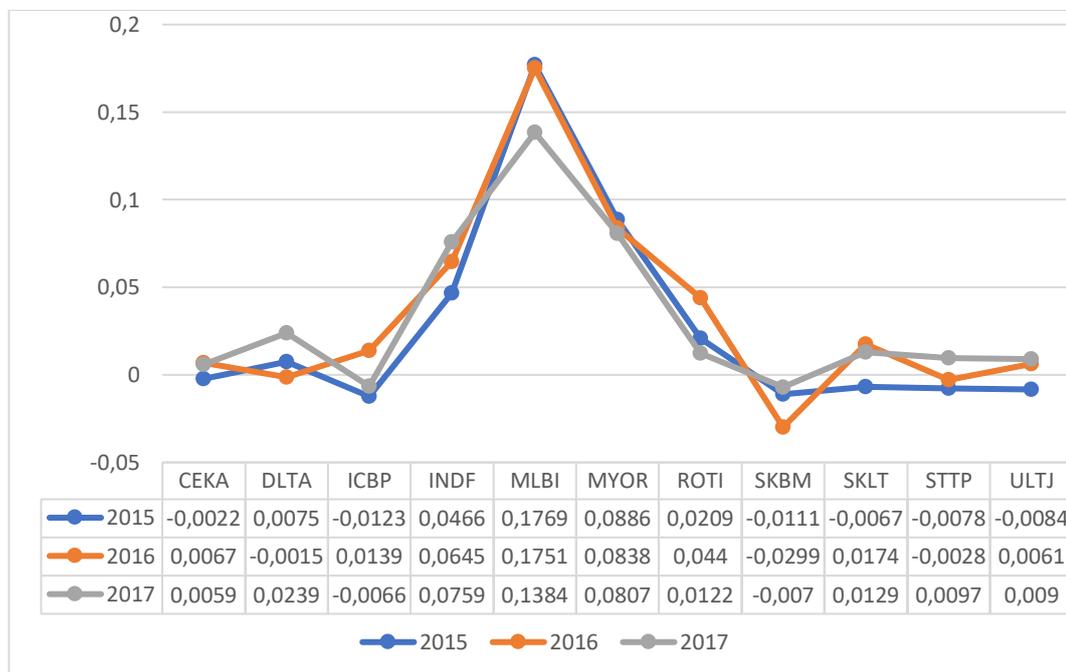
sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan dilakukannya sistem ini khususnya berkaitan dengan peningkatan dalam hal keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak, sehingga masyarakat wajib pajak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakan dengan lebih baik lagi. Selain itu *self assessment system* dilakukan untuk menuntut agar para wajib pajak memiliki perubahan sikap terhadap pembayaran pajak secara sukarela. Pemerintah juga melakukan optimalisasi perpajakan dalam rangka peningkatan penerimaan perpajakan, melalui perbaikan basis data pajak sebagai hasil program *tax amnesty* (www.kemenkeu.go.id). Pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan suatu kesempatan berbatas waktu pada kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana (Hunurrosyidah, 2017).

Sistem tersebut justru bisa menimbulkan kendala yang dapat menghambat pemungutan pajak, yaitu kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Hambatan tersebut dapat terjadi akibat tindakan pasif yang diberikan masyarakat yang tidak begitu paham mengenai sistem perpajakan. Sedangkan tindakan aktif yang diberikan wajib pajak juga dapat menjadi penghambat dalam pemungutan pajak, yaitu berdasarkan tujuan untuk menghindari pajak. Kendala ini dapat berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban dan mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajaknya. Namun, bagi perusahaan sendiri pajak dijadikan sebagai salah satu beban yang dapat mengurangi jumlah laba bersih perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi beban atau biaya pajak tersebut. Menurut Mardiasmo (2018: 11), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Penghindaran pajak mengacu terhadap pengurangan dalam pembayaran pajak secara legal, misalnya melalui celah-celah pada peraturan perpajakan yang ada. Berbeda halnya dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang mengacu terhadap

penghindaran pajak secara ilegal, misalnya dengan melaporkan pendapatan yang tidak benar ataupun melakukan pengurangan pendapatan yang tinggi. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang sah secara hukum serta moral terkait dengan penghematan di aspek pembayaran pajak, dengan kata lain penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk upaya efisiensi beban pajak.

Tax avoidance dapat diproksikan dengan menggunakan BTD dibagi total aset, yaitu perbedaan antara laba sebelum pajak dengan PKP (Penghasilan Kena Pajak) (Pohan, 2019). Pohan (2009) menjelaskan bahwa semakin kecil nilai *book tax difference*, makin menurun penghindaran pajak (*tax avoidance*), sebaliknya apabila *book tax difference* terlihat besar maka perusahaan diindikasikan melakukan manipulasi atau penghindaran pajak.



Gambar 1.3 Book Tax Difference Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman

Sumber: *www.idx.co.id*, data diolah penulis (2018)

Gambar 1.3 menunjukkan nilai BTB perusahaan subsektor makanan dan minuman yang fluktuatif. Namun INDF, MLBI, MYOR, dan ROTI memiliki selisih BTB yang cukup besar dan menonjol dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

Keempat perusahaan tersebut diduga telah melakukan tindakan penghindaran pajak dikarenakan selisih laba sebelum pajak dan penghasilan kena pajak yang cukup besar. Perubahan nilai BTD yang dialami ROTI sangat fluktuatif, MLBI dan MYOR memiliki BTD yang selalu menurun, sedangkan INDF memiliki nilai BTD yang selalu meningkat dari tahun 2015-2017.

Pengaruh terhadap *tax avoidance* diduga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya proporsi komisaris independen, *financial distress*, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan. Faktor-faktor tersebut akan diteliti dalam penelitian ini. Pengaruh beberapa variabel seperti pertumbuhan penjualan dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* memang sudah banyak ditemukan di dalam beberapa penelitian oleh para peneliti sebelumnya, namun penelitian terdahulu masih menunjukkan variasi dalam hasil penelitian dan menunjukkan inkonsistensi. Selain itu, sudah banyak penelitian yang membahas mengenai *financial distress*, namun belum banyak peneliti yang membahas pengaruh dari *financial distress* terhadap *tax avoidance* di Indonesia, demikian pula dengan intensitas aset tetap.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan tersebut. Menurut Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, proporsi minimal komisaris independen dalam suatu perusahaan adalah 30%. Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen (Raharjo dan Daljono, 2014).

Kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil menyebabkan kesulitan bagi perusahaan untuk tetap eksis dan stabil dalam menghadapi persaingan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk selalu berinovasi menghadapi tantangan yang ada. *Financial distress* merupakan suatu keadaan yang dapat menggambarkan awal kebangkrutan perusahaan yang ditandai dengan kesulitan keuangan atau likuiditas perusahaan yang rendah. Jika beban pajak merupakan *cash outflow* utama,

manajemen perusahaan akan lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak seiring dengan kebutuhan kas yang sangat kritis.

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperkirakan digunakan selama lebih dari satu periode dan dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif (PSAK 16 Aset Tetap). Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menunjukkan jumlah aset tetap terhadap total aset perusahaan. Menurut Mulyani dan Meisiska (2016), pada aset tetap, perusahaan dapat menemukan pos beban, yaitu beban penyusutan dari aset tetap yang dapat mengurangi pendapatan. Apabila intensitas aset tetap pada suatu perusahaan tinggi, maka beban perusahaan akan tinggi dan dapat mengurangi laba, sehingga penghasilan kena pajaknya pun juga akan berkurang. Namun demikian, perusahaan tidak perlu melakukan upaya-upaya praktik *tax avoidance* dikarenakan beban depresiasi yang tinggi.

Pertumbuhan perusahaan diukur melalui seberapa besar perusahaan dapat bertahan dalam industri dan perkembangan ekonomi, salah satunya diukur melalui pertumbuhan penjualan atau *sales growth*. Pertumbuhan penjualan merupakan rasio antara penjualan tahun sekarang dikurangi dengan penjualan tahun lalu dan dibagi penjualan tahun sebelumnya. Adanya pertumbuhan penjualan yang besar dapat digunakan oleh manajemen dalam memprediksi laba yang cenderung besar. Hal tersebut mendorong manajemen untuk melakukan *tax avoidance* karena laba kena pajak yang besar juga akan menghasilkan beban pajak yang besar.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) dan Rosalia dan Sapari (2017) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih, Sulardi, dan Suranta (2017) dan Fadhila, Pratomo, dan Yudowati (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya penelitian terkait *financial distress* oleh Feizi, *et al.* (2016) dan Richardson, Taylor, dan Lanis (2015) menyebutkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *financial distress* pada perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajaknya (*tax avoidance*). Namun hasil yang berbeda terdapat dalam penelitian

yang dilakukan oleh Alifianti, Putri, dan Chariri (2017), bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Lalu penelitian oleh Nugroho dan Firmansyah (2017) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Menurut Dharma dan Ardiana (2016) dan Purwanti dan Sugiyarti (2017), intensitas aset tetap memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha dan Noviani (2015) dan Savitri (2017), bahwa intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian terkait pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) dan Purwanti dan Sugiyarti (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) dan Hidayat (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan atau *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian sebelumnya, adanya inkonsistensi hasil dari berbagai penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan juga berdasarkan fenomena terhadap *tax avoidance* yang telah dibahas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai variabel-variabel yang terkait pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, *Financial Distress*, Intensitas Aset Tetap dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017”**.

1.3 Rumusan Masalah

Kontribusi pajak sangatlah penting dalam penerimaan negara, dikarenakan persentasenya adalah yang terbesar. Namun pada faktanya, realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu tidak mencapai target. Pemerintah bertujuan agar penerimaan pajak yang diterima adalah 100 persen dari anggaran atau target yang telah ditentukan. Namun, persentase realisasi penerimaan pajak berfluktuasi, dimana terus terjadi penurunan persentase penerimaan pajak selama tahun 2013-2015, lalu

meningkat pada 2016-2017 di perusahaan subsektor makanan dan minuman. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban dan mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajaknya. Namun, bagi perusahaan sendiri, pajak dijadikan sebagai salah satu beban yang dapat mengurangi jumlah laba bersih perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi beban pajak tersebut salah satunya adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada dasarnya cukup banyak. Beberapa penelitian telah dilakukan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* dimana banyak peneliti yang menyoroti pengaruh komisaris independen dan pertumbuhan penjualan. Namun belum banyak penulis yang menyoroti pengaruh *financial distress* dan intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*. Selain itu, variabel independen ini dipilih karena adanya inkonsistensi hasil terkait hubungan antara keempat variabel tersebut terhadap *tax avoidance* sehingga penelitian kembali mengenai pengaruh komisaris independen, *financial distress*, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan masih relevan untuk dilakukan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komisaris independen, *financial distress*, intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan, dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara komisaris independen, *financial distress*, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?

4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?
5. Apakah terdapat pengaruh secara parsial intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?
6. Apakah terdapat pengaruh secara parsial pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan komisarisi independen, *financial distress*, intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan, dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara komisarisi independen, *financial distress*, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial komisarisi independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

6. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Manfaat dari aspek teoritis yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi terkait dengan variabel komisaris independen, *financial distress*, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan, *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber referensi dan sumber pustaka untuk penelitian selanjutnya.

1.6.2 Aspek Praktis

Manfaat dari aspek praktis yang ingin dicapai penulis dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat perusahaan untuk tetap tertib membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan.
2. Bagi Direktorat Jendral Pajak
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pembuatan peraturan agar mampu meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *website* resmi Bursa Efek Indonesia sebagai sumber informasi. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur

sub sektor makanan dan minuman untuk mengetahui bagaimana komisaris independen, *financial distress*, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2018. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit periode 2013-2017 pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.7.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan lima variabel yang terdiri dari satu variabel terikat (variabel dependen) dan empat variabel bebas (variabel independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Dalam penelitian ini variabel independen yang mungkin mempengaruhi *tax avoidance*, antara lain komisaris independen, *financial distress*, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh variabel independen baik secara simultan maupun parsial terhadap variabel dependen.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang saling berkaitan, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat, yang terdiri dari beberapa sub – bab. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti, perumusan masalah yang mengidentifikasi masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang menjadi dasar acuan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel independen (komisaris independen, *financial distress*, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan) dan variabel dependen (*tax avoidance*), definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai variabel independen dan variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini membahas tentang beberapa kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN